

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aminuddin I. Hak Menguasai Negara: Dalam Privatisasi BUMN. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Budiardjo M. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Cetakan Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Fuller LL. *The Morality of Law*, rev. edn. New Haven CT and London : Yale University Press, 1969.
- Palguna IDG. *Pengaduan Konstitusional (constitutional complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Busroh AD, Busro A. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.
- Costa P, Zolo D, Santoro E. *The Rule of Law, History, Theory and Criticism*. Dordrecht: Springer. 2007
- Inu Kencana Syafie. *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Isjwara F. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Bina Cipta. 1974.
- Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta, Konstitusi Press. 2012.
- Janedjri M. Gaffar, “*Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945*”, Jakarta, Konstitusi Press. 2015.
- Jimly Asshidiqie. *Pengantar ilmu hukum tata negara jilid II*. Jakarta: Konstitusi Press. 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Buana Ilmu. 2007.
- Locke, J. John Locke-*Second Treatise of Government*. Strelbytskyy Multimedia Publishing. 2020.
- Mardian Wibowo. *Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi konsep dan kajian dalam pembatasan kebebasan pembentuk undang-undang*, Rajawali Pers, Jakarta. 2019.
- SF Marbun. *Dimensi-Dimensi Pemikiran/ Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press. 2001.

Siahaan M. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Soekanto S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2007.

Zairin H. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Raja Grafindo. 2014.

Jurnal

Ajie, R. *Batasan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang (Open legal policy) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Legislasi Indonesia. 2016.

Arifin A. *Peran Hakim dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia*. IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research. 2023.

Evans JM. *The Principles of Fundamental Justice: The Constitution and the Common Law*. Osgoode Hall Law Journal. 1991

Mardian Wibowo. *Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang- Undang*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 2. 2015.

Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi, Cetakan Pertama. Gramedia, Jakarta. 2008.

MPR RI. *Checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Badan Pengkajian MPR RI. 2017

Muhtadi. *Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi*. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum. 2015.

Prasetyoningsih N. *Substansi Gagasan dalam Beberapa Konsep Negara Hukum*. Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. 2020.

Prianto W. *Analisis Hierarki Perundang-Undangan berdasarkan Teori Norma Hukum oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. 2024.

Satriawan I, Lailam T. *Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang*. Jurnal Konstitusi. 2019.

Soeroso FL. *Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. 2014.

Subiyanto, AE. *Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional*. Jurnal Konstitusi. 2011.

Titik Triwulan Tutik. *Eksistensi, Kedudukan, dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik*

Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2007.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XVII/2023;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-XXI/2023;

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023.